



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IVAN RIZAL SINI
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 1017982

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **186.127.418.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 323 m2/309 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , WARISAN Rp. 25.877.418.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 622 m2/457 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 716 m2/443 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 37.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 753 m2/1.930 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 42.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 545 m2/750 m2 di NEGARA AUSTRALIA, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000.000
6. Bangunan Seluas 0 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **1.875.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA 862.OLAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
2. MOBIL, MERC BENZ GLS 450 4M (X167) Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
3. MOBIL, BMW - M235 I 320I 2014 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000



4. MOBIL, RANGE ROVER SPORT EVOQUE Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	3.904.545.689
D. SURAT BERHARGA	Rp.	72.816.200.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	30.831.045.719
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	295.554.209.408

III. HUTANG Rp. 108.214.496.513

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 187.339.712.895

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.